

Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan |
Alamat: Jl. A. Yani No.KM 12.5, Banua Hanyar, Kec. Kertak
Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalsel, Indonesia 70652

Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023

¹Faisal

¹Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Banjar, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Sosial Hiumaniora, Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama
Kalimantan Selatan, Banjar, Indonesia

e-mail: Bmbfaisal@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of the South Kalimantan Provincial Budget for the 2018-2023 Fiscal Year based on regional financial methods. This research uses quantitative descriptive research methods. The data used is secondary data. The results showed that, the 2018-2023 South Kalimantan Provincial APBD Financial Performance when viewed from the Decentralization Degree Ratio showed very good results because based on the results of the average ratio calculated for 6 years was at 57%. While the Effectiveness Ratio shows effective results because based on the results of the average ratio calculated over 6 years it is at 103%. While the Efficiency Ratio shows efficient results because based on the results of the average ratio calculated over 6 years it is at 94%. While the Compatibility Ratio is seen from the ratio of operating expenditures calculated over 6 years, the average result is 62% which is still included in the general portion category and seen from the capital expenditure ratio calculated over 6 years, the average result is 17% which is still included in the general portion category. While the Independence Ratio shows deleterious results because based on the average results of the ratio calculated over 6 years it is 137%. While the Growth Ratio shows very low results because based on the results of the average ratio calculated over 6 years is at 7%.

Keywords: Degrees of Decentralization, Effectiveness, Efficiency, Compatibility, Independence, Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 berdasarkan metode keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2023 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan hasil sangat baik karena berdasarkan hasil rata-rata rasio yang dihitung selama 6 tahun berada diangka 57%. Sedangkan Rasio Efektivitas menunjukkan hasil efektif karena berdasarkan hasil rata-rata rasio yang dihitung selama 6 tahun berada diangka 103%. Sedangkan Rasio Efisiensi menunjukkan hasil efisien karena berdasarkan hasil rata-rata rasio yang dihitung selama 6 tahun berada diangka 94%. Sedangkan Rasio Keserasian dilihat dari rasio belanja operasi yang dihitung selama 6 tahun hasil rata-rata berada diangka 62% yang mana masih termasuk kategori porsi umum dan dilihat dari rasio belanja modal yang dihitung selama 6 tahun hasil rata-rata berada diangka 17% yang masih termasuk kategori porsi umum. Sedangkan Rasio Kemandirian menunjukkan hasil efektif karena berdasarkan hasil rata-rata rasio yang dihitung selama 6 tahun berada diangka 137%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan hasil rendah sekali karena berdasarkan hasil rata-rata rasio yang dihitung selama 6 tahun berada diangka 7%.

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi, Efektivitas, Efisiensi, Keserasian, Kemandirian, Pertumbuhan

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kemajuan suatu negara harus didukung oleh semua komponen pemerintahan baik dari level teratas hingga paling bawah. Pada ranah otonomi daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengembangkan potensinya. Maka semua baik dari pemerintah kota maupun provinsi diberikan wewenang secara mandiri dalam pembuatan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Serta bertanggungjawabkan semua pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka dari itu pemerintahan diberikan kuasa untuk menentukan prioritas dan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Bahrudin (2017) menyatakan APBD adalah rincian dari rencana kerja dari suatu entitas pemerintahan berupa biaya selama 1 periode yang ingin dipakai dan yang akan menyetujui APBD adalah pihak DPRD. Penelitian yang berkaitan dengan APBD telah banyak dilakukan dan dengan hasil yang berbeda-beda. Gabby Febryanti Sahara dan Muzdalifah (2019) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 9 kabupaten masih sangat kurang dan 4 kabupaten/kota kurang, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 4 kabupaten masih sangat rendah, 7 kabupaten rendah dan 2 kota cukup mandiri, rata-rata rasio efektivitas PAD hampir semua kabupaten/kota sangat efektif kecuali kota Banjarmasin efektif, rasio efisiensi keuangan daerah 9 kabupaten/kota kurang efisien dan 2 kabupaten cukup efisien, sedangkan kota Banjarbaru tidak

efisien, rasio pertumbuhan PAD bernilai positif. Pada tahun 2019-2021 Di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi fenomena yaitu wabah Covid-19 dan Bencana Banjir. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa bagus kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam konteks pengelolaan keuangannya pada saat terjadinya fenomena tersebut. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan Fenomena diatas maka akan dilakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 dengan menggunakan Metode Rasio keuangan daerah.

Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa pengertian anggaran sektor publik adalah “estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Mahsun (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Menurut Sari dkk (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui kinerja keuangan. Menurut Suharsimi Arikunto (2019) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data, yaitu data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Sumber data peneliti ambil dari web Postur APBD. Dalam pengumpulan data dan informasi, menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiono (2015:329) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dalam Tabel 1 Menunjukkan variabel yang untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta skala interval yang digunakan untuk mentukan baik atau tidaknya kinerja keuangan pada masing-masing variabel

Tabel 1. Oprasional Variabel dan Skala Interval

No	Rasio	Rumus	Skala Interval	Keterangan
1	Rasio Derajat Desentralisasi	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	0%-10%	Sangat Kurang
			10,1%-20%	Kurang
			20,1%-30%	Cukup
			30,1%-40%	Sedang
			40,1%-50%	Baik
2	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Anggaran Pendapatan PAD}} \times 100\%$	< 100%	Tidak Efektif
			100%	Efektivitas Berimbang
			> 100%	Efektif
3	Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	<100%	Efisien
			100%	Efisien Berimbang
			>100%	Tidak Efisien
4	Rasio Belanja Operasi	$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	60%-90%	Porsi Umum
5	Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	5%-20%	Porsi Umum
6	Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\%$	0-25%	Instruktif
			26%-50%	Konsultatif
			51%-75%	Partisipatif
			76%-100%	Delegatif
7	Rasio Pertumbuhan	$\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Daerah } (t-1)} \times 100\%$	0-10%	Rendah Sekali
			11%-20%	Rendah
			21%-30%	Sedang
			Diatas 40%	Tinggi

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dapat diketahui dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut Mahmudi (2016) Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap seberapa besar realisasi penerimaan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah akan dinyatakan mampu melakukan desentralisasi apabila kontribusi daerah semakin meningkat. Menurut Adhiantoko (2016) Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Mahmudi (2016:143) mengatakan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengukur kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi digunakan untuk Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (pengeluaran) dan data realisasi pendapatan (penerimaan). Menurut Mahsun (2016) rasio efisiensi adalah mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik.

Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Menurut Mahmudin (2017:152) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah, Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%.

Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal menginformasikan kepada pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudin (2017:152) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah, Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20%.

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri. Menurut Abdul Halim (2017) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yaitu yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain. Menurut Mahsun (2016) rasio kemandirian digunakan untuk lebih memahami seberapa besar tingkat kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Mahmudi (2016) Rasio pertumbuhan pendapatan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar perkembangan/pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Analisis bermanfaat untuk mengetahui kinerja anggaran yang bersangkutan mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Jika mengalami pertumbuhan positif berarti kinerja pemerintah semakin baik dan apabila mengalami pertumbuhan negatif (penurunan) berarti kinerja menurun. Menurut Abdul Halim (2017) Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Tabel 2 Menunjukkan hasil perhitungan analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023

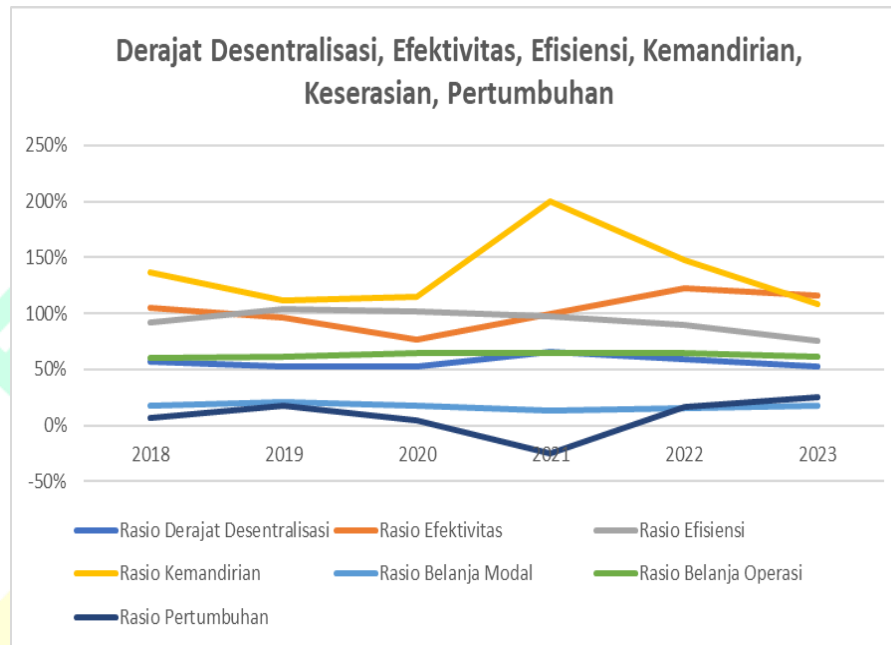
Tabel 2. Hasil Kinerja Keuangan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Rasio
Rasio Derajat Desentralisasi	57%	52%	53%	66%	59%	52%	57%
Kriteria	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Rasio Efektivitas	105%	96%	77%	100%	123%	116%	103%
Kriteria	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektivitas Barimbang	Efektif	Efektif	Efektif
Rasio Efisiensi	92%	104%	102%	97%	90%	76%	94%
Kriteria	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
Rasio Kemandirian	137%	111%	115%	200%	148%	108%	137%
Kriteria	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif
Rasio Pertumbuhan	7%	18%	4%	-25%	16%	25%	7%
Kriteria	Rendah Sekali	Rendah	Rendah Sekali	Sangat Rendah Sekali	Rendah	Sedang	Rendah Sekali
Rasio Belanja Modal	17%	21%	18%	13%	15%	18%	17%
Kriteria	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum
Rasio Belanja Operasi	60%	61%	64%	64%	64%	61%	62%
Kriteria	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum	Porsi Umum

Sumber: Data diolah

Pada rasio derajat desentralisasi menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 57% artinya Provinsi Kalimantan Selatan sangat baik dalam berkontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada rasio efektivitas menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 103% artinya Provinsi Kalimantan Selatan efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah. Pada rasio efisiensi menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 94% artinya Provinsi Kalimantan Selatan efisien dalam menggunakan realisasi pendapatan daerah. Pada rasio kemandirian menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 137% artinya Provinsi Kalimantan Selatan delegatif atau pemerintah pusat tidak lagi ikut campur tangan dalam pemerintahan daerah. Pada rasio pertumbuhan menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 7% artinya Provinsi Kalimantan Selatan rendah sekali dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Pada rasio belanja modal menunjukkan hasil rasio diangka 17% artinya Provinsi Kalimantan Selatan berada pada porsi umum dalam menggunakan anggaran belanja modal. Pada rasio belanja operasi menunjukkan hasil rasio diangka 62% artinya Provinsi Kalimantan Selatan berada pada porsi umum dalam menggunakan anggaran belanja operasi.

Dalam Gambar 1 Menunjukkan grafik perkembangan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023



Gambar 1. Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar menunjukkan Tingkat derajat desentralisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018-2023 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada rasio menunjukkan di atas 50%.

Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2018 dikategorikan efektif karena tingkat rasio efektivitasnya lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan kategori tidak efektif karena tingkat rasio kurang dari 100% dan pada tahun 2021 menunjukkan kategori efektivitas berimbang karena tingkat rasio 100% dan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kategori efektif karena tingkat rasio lebih dari 100%. Rasio Efektivitas dapat dikatakan efektif karena berdasarkan rasio efektivitas yang dihitung selama 6 tahun rata-rata berada 103% yang mana masih termasuk dalam kategori efektif.

Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran tahun 2018 berada pada kategori efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan kurang dari 100% sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 berada pada kategori tidak efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan lebih dari 100% dan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 berada pada kategori efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan kurang dari 100%. Rasio efisiensi dapat dikatakan efisien karena berdasarkan rasio efisiensi yang dihitung selama 6 tahun rata-rata berada 94% yang mana masih termasuk kategori efisien.

Tingkat belanja operasi untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada tahun 2018-2023 total belanja operasi terhadap total belanja daerah berada pada proporsi rasio belanja operasi yaitu di antara 60%-90%. Rasio belanja operasi dapat dikatakan sesuai proporsi berdasarkan rasio belanja operasi yang dihitung 6 tahun rata-rata berada 62%.

Tingkat belanja modal untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022 dan 2023 total belanja modal terhadap total belanja daerah berada pada proporsi rasio belanja modal yaitu di antara 5%-20%, sedangkan pada tahun 2019 total belanja modal terhadap total belanja daerah tidak berada pada proporsi yaitu di angka 21%. Rasio belanja operasi

dapat dikatakan sesuai proporsi berdasarkan rasio belanja modal yang terhitung 6 tahun rata-rata berada 17%.

Tingkat kemandirian kinerja keuangan pada tahun 2018-2023 dikategorikan tinggi atau pola hubungan dengan pemerintah pusat berada pada pola hubungan delegatif karena tingkat rasio kemandirian lebih dari 100%, Rasio kemandirian dapat dikatakan tinggi atau pola hubungan dengan pemerintah pusat berada pada pola hubungan delegatif karena berdasarkan rasio kemandirian yang terhitung selama 6 tahun rata-rata berada 137% yang mana masih termasuk dalam kategori tinggi. Namun di tahun 2021 menunjukkan angka presentase sangat tinggi diangka 200% hal ini di sebabkan karena angka pendapatan asli daerah tinggi dibandingkan transfer dari pusat

Tingkat Pertumbuhan kinerja keuangan pada tahun 2018 dan 2020 dikategorikan rendah sekali karena tingkat rasio perumbuhannya kurang 10%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2022 menunjukkan kategori rendah karena tingkat rasio perumbuhannya kurang dari 20% dan pada tahun 2021 menunjukkan kategori sangat rendah sekali karena tingkat rasio pertumbuhannya -25% hal ini dikarenakan pendapatan tahun 2021 terhitung rendah dibandingkan tahun tahun 2020 yang mengakibatkan rasio pertumbuhan sangat rendah sekali dan pada tahun 2023 menunjukkan kategori sedang karena tingkat rasio perumbuhannya 25%. Rasio pertumbuhannya dapat dikatakan rendah sekali karena berdasarkan rasio perumbuhannya yang terhitung selama 6 tahun rata-rata berada 7% yang mana masih termasuk dalam kategori rendah sekali.

IV. KESIMPULAN & SARAN

Penelitian ini mendapatkan hasil tingkat kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023. Dari keseluruhan variabel dapat disimpulkan bahwa Rasio derajat desentralisasi, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian berdasarkan rata-rata perhitungan selama periode 2018-2023 pada Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang baik, Sedangkan untuk Rasio pertumbuhan berdasarkan rata-rata perhitungan menunjukkan hasil kurang baik.

Dari penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti ini pastinya mendapatkan banyak kendala dan kekurangan, sehingga peneliti merasa sangat penting untuk memberikan saran yang semoga membantu untuk para peneliti selanjutnya terutama dalam konteks peneliti yang ingin mengembangkan atau bahkan melanjutkan penelitian ini, berikut adalah saran yang semoga membantu yang diberikan peneliti. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain Metode Keuangan Daerah, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2017). Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Selemba Empat
- Aedy, H. H., & H. Mahmudin. (2017). Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi: Penuntun Bagi Mahasiswa dan Peneliti). Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan daerah pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2017) Perpajakan, edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sahara, G. f., & Muzdalifah. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 789-803.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Pulau Sumatra. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 678.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.